

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara, sesuai UUD 1945, adalah masyarakat adil dan makmur. Kemudian oleh Pemerintah diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sebagai upaya perwujudan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan maka langkah Pemerintah adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam Tap MPR Nomor : XVI/MPR-RI/1998, yang dimaksud pemberdayaan adalah pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Setiap pelaku usaha memerlukan informasi yang komprehensif dan akurat tentang badan usaha yang dikelola atau yang diamatinya. Karena itu, informasi keuangan merupakan kebutuhan mutlak setiap pelaku usaha. Keseluruhan aktifitas dan proses untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu badan usaha tersebut dikenal sebagai akuntansi. Mengingat peran vital informasi keuangan bagi suatu usaha dan berbagai pihak yang berkaitan dengan usaha tersebut, maka proses menyediakan informasi keuangan tersebut harus dilakukan secara baik, sistematis, dan hati-hati. Agar mampu menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan

akurat, diperlukan penguasaan terhadap ilmu akuntansi secara komprehensif (Yasmir, 2018).

Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kemampuan, mendorong orang untuk membuka usaha sendiri. Kalau dilihat akhir-akhir ini banyak bermunculan usaha-usaha baru, khususnya usaha mikro dan kecil . Anggapan mereka hanya usaha ini lah yang dapat mereka lakukan untuk menopang kebutuhan keluarga yang dari hari ke hari semakin sulit. Kebanyakan mereka melakukan usaha secara asal-asalan, tanpa banyak pertimbangan dan perencanaan. Sehingga tak heran bila banyak diantaranya yang bagai pepatah, hidup segan mati pun tak mau, hanya asal bisa bertahan saja. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya membuat Usaha Mikro dan Kecil berhasil (Indriyatni, 2013), termasuk di Negara Republik Indonesia.

Sejak krisis moneter tahun 2008 peranan UMKM dapat dipandang sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Yasmir, 2018). Sehingga Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi negara (Narsa, Widodo, dan Kurnianto, 2012). Hal tersebut sejalan dengan Budiarto, Putero, Suyatna, Putro, Astuti, Saptoadi, Ridwan, dan Susilo (2015) yang mengungkapkan bahwa selain koperasi, UMKM merupakan pilar perekonomian nasional. Tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya Artini (2019) menyatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan bagi mendukung perkembangan ekonomi secara

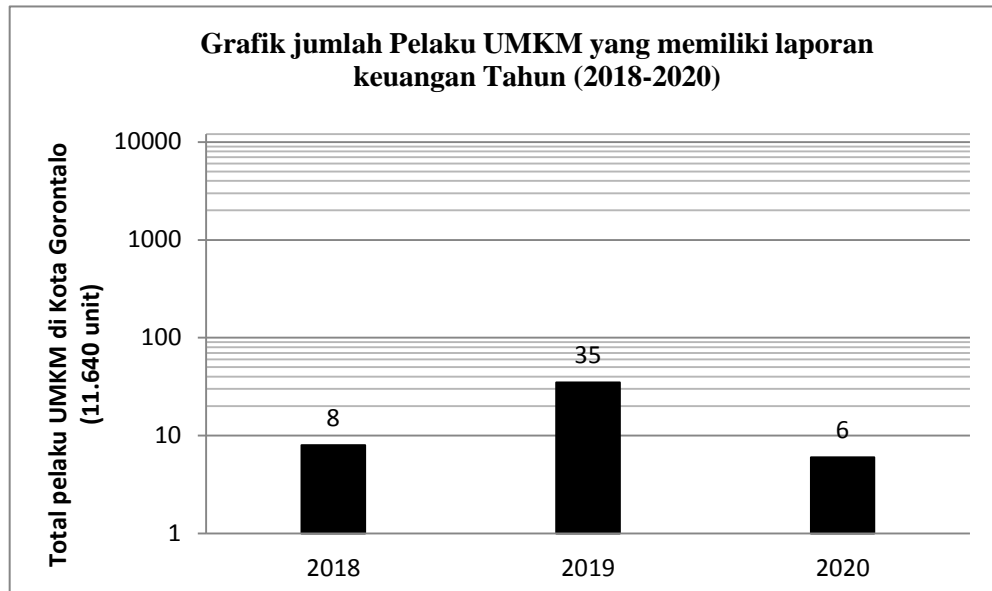
makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain bisa berkembang.

Dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu kekuatan besar dalam perekonomian Negara sehingga penting untuk dikembangkan. Berkaitan dengan UMKM, sudah tentu Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya membuat Usaha Mikro dan Kecil berhasil (Indriyatni, 2013). Salah satu kendala UMKM yaitu terkait pelaporan keuangan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Purwati, Suparlinah, dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa kenyataanya sebagian besar UMKM di Indonesia tidak menggunakan informasi akuntansi dalam usaha mereka. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Purba (2019) yang menjelaskan bahwa masih banyak UMKM di Kota Batam yang belum melakukan pencatatan pembukuan sesuai standar akuntansi.

Demikian juga Isgiyarta (2009) menyatakan bahwa Pembukuan yang diterapkan oleh UMKM pernah diterapkan menerapkan namun tidak berkelanjutan. Sehingga penerapan Laporan Keuangan sesuai standar keuangan yang berlaku di Indonesia belum sesuai harapan serta masih melakukan pencatatan secara sederhana (Mattoasi, Usman, dan Didiet, 2021). Tidak terkecuali pada UMKM yang ada di Kota Gorontalo, yang jumlah UMKM telah mencapai 11.460 Unit (Sumber Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo). Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 1.1

Grafik jumlah pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan tahun 2018-2020



Sumber data Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa di Kota Gorontalo dari tahun 2018-2020 jumlah pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan sesuai SAK EMKM masih sangat kurang bahkan grafiknya cenderung berfluktuasi. Berkaitan dengan hal tersebut, faktor penting dalam melakukan pengembangan usaha yaitu pembukuan (Hidayat, Juitania, Suharna, Indrawan, dan Syahputra, 2020). Sehingga salah satu cara Agar para Pelaku UMKM mampu menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat, diperlukan penguasaan terhadap ilmu akuntansi secara komprehensif (Yasmir, 2018). Demikian juga Putri, Lindawati, Anggraini, Hanah, dan Indawati (2021) menyatakan bahwa Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan keuangan yang baik tersebut, pemilik UMKM perlu untuk lebih berorientasi strategis dan hal ini memerlukan perbaikan pada pengelolaan informasi keuangan yang dapat membuka peluang usaha yang lebih besar. Keahlian tersebut diperlukan untuk

mempertahankan atau memperbaiki produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru (Nanik Risnawati, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut dan belum ada penelitian khusus yang membahas tentang Implementasi entitas bisnis terhadap pendapatan UMKM. Maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan formulasi judul implementasi konsep entitas bisnis terhadap keberhasilan suatu UMK dilihat dari tingkat perolehan pendapatan di Kecamatan Duingi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian, sebagai berikut: pelaku UMK di Kecamatan Duingi belum sepenuhnya menerapkan konsep entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama di dalam pencatatan akuntansi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana penerapan kosep entitas bisnis berpengaruh dalam meningkatkan omset Pendapatan UMK di Kecamatan Duingi ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: untuk mengetahui bagaimana penerapan entitas bisnis berpengaruh dalam meningkatkan omset pendapatan UMK di Kecamatan Duingi

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang konsep entitas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan atau bahan acuan dalam pengembangan ilmu penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pengurus UMK agar dapat memperhatikan masyarakat kecil yang ingin melakukan usaha baik itu usaha mikro ataupun usaha kecil.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pelaku UMK di Kecamatan Duingi agar dapat lebih baik dalam mengelolah usaha mikro kecil yang dijalankan.